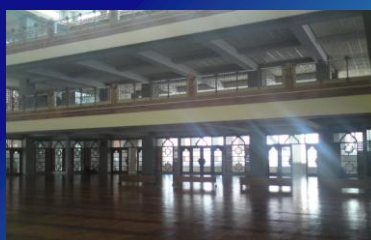


RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pelaksanaan Proyek Pinjaman Luar Negeri

Edisi Triwulan I
Tahun 2009



KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL /
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KATA PENGANTAR

Buku Laporan Kinerja Proyek-proyek Pinjaman Luar Negeri (LKPPLN) edisi Triwulan I Tahun 2009 ini merupakan hasil rapat pemantauan Triwulan Kesatu Tahun 2009 yang diselenggarakan pada bulan April 2009. Rapat dimaksud diselenggarakan Bappenas dengan peserta rapat dari instansi pelaksana, instansi terkait lainnya dan perwakilan kreditur/*lender* di Indonesia.

Pada Buku Laporan ini, pinjaman luar negeri *on-going* yang dipantau pelaksanaannya berjumlah 156 pinjaman, yang terdiri dari 155 pinjaman proyek (*project loan*) dan satu pinjaman program (*program loan*).

Beberapa permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan dapat diidentifikasi pada Triwulan I yang sebagian telah dilakukan langkah-langkah tindak lanjut maupun dalam proses penyelesaiannya. Diidentifikasi penyebab keterlambatan antara lain dalam proses pengadaan atau terjadi pelelangan ulang (*re-tender*), lamanya pemrosesan dokumen anggaran, masalah pengadaan tanah, besarnya *backlog* yang harus di-*replenish* dan masalah lain terkait dengan lemahnya manajemen pengelolaan proyek baik yang disebabkan oleh “luasnya” lingkup proyek (termasuk proyek yang melibatkan banyak instansi pelaksana dan juga pemerintah daerah), lemahnya kemampuan pengelola proyek, serta masalah-masalah teknis di lapangan seperti koordinasi dan penerbitan peraturan.

Semoga buku Ringkasan Eksekutif ini dapat memberikan gambaran secara ringkas mengenai kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri pada Triwulan I Tahun 2009 ini.

Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas

H. Paskah Suzetta

RINGKASAN EKSEKUTIF

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI TRIWULAN I TA 2009 (Posisi 31 Maret 2009)

I. Gambaran Umum

Proyek-proyek pinjaman luar negeri yang sedang berjalan yang dipantau pelaksanaannya sampai dengan akhir Maret 2009 berjumlah 155 pinjaman proyek dengan total nilai USD 15,24 milyar dan 1 pinjaman program sebesar USD 600,00 juta.

Penarikan kumulatif sampai dengan 31 Maret 2009 adalah sebesar USD 6,42 milyar atau 40,56% dari total nilai pinjaman proyek dan program, sehingga total dana yang belum ditarik adalah sebesar USD 9,42 milyar. Penarikan pada tahun anggaran berjalan periode Januari – Maret tahun 2009 yaitu sebesar USD 714,58 juta atau 18,25% terhadap target penarikan sebesar USD 3,92 milyar atau lebih tinggi dari penarikan pada periode yang sama pada tahun 2008 yang mencapai 14,69%.

Tabel 1. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri per 31 Maret 2009

(dalam juta USD)

No.	Pinjaman	Jumlah Program	Jumlah Pinjaman	Penarikan Kumulatif		Pinjaman belum ditarik	TA 2009		
				Jumlah	%		Target	Realisasi	%
1	Pinjaman program	1	600,00	172,30	28,72	427,70	300,00	125,50	41,83
2	Pinjaman Proyek	155	15.239,52	6.252,15	41,03	8.987,37	3.615,02	589,08	16,30
	Total	156	15.839,52	6.424,45	40,56	9.415,07	3.915,02	714,58	18,25

Sumber: LKPPPLN Edisi Triwulan I 2009

1.1 Pinjaman Program

Pada Triwulan I Tahun 2009 terdapat 1 pinjaman program yang sedang berjalan dengan jumlah pinjaman sebesar USD 600,00 juta. Pinjaman program tersebut bersumber dari Bank Dunia, sementara pinjaman program yang bersumber dari ADB telah ditarik seluruhnya pada tahun anggaran yang lalu.

Tabel 2. Status Penarikan Pinjaman Program Triwulan I TA 2009

(dalam juta USD)

No.	Pemberi Pinjaman	Jumlah Program	Jumlah Pinjaman	Penarikan Kumulatif	Pinjaman belum ditarik	TA 2009		
						Target	Realisasi	%
1	Bank Dunia	1	600,00	172,30	427,70	300,00	125,50	41,83
	Total	1	600,00	172,30	427,70	300,00	125,50	41,83

Sumber: LKPPPLN Edisi Triwulan I 2009

1.2 Pinjaman Proyek

Dilihat dari sumber dananya, pinjaman proyek yang sedang berjalan berasal dari Bank Dunia sebanyak 21 pinjaman proyek; ADB 25 pinjaman proyek; JICA 45 pinjaman proyek; Multilateral dan Bilateral Lainnya masing-masing sebanyak 17 pinjaman proyek dan proyek-proyek lain yang dibiayai dari Fasilitas Kredit Ekspor (FKE) sebanyak 30 proyek.

Realisasi penarikan kumulatif pinjaman pinjaman proyek sampai dengan Triwulan I Tahun 2009 sebesar USD 6,25 milyar atau 41,03% dari total pinjaman proyek USD 15,24 milyar. Sedangkan realisasi penarikan pinjaman proyek pada tahun anggaran berjalan periode Januari – Maret tahun 2009 sebesar USD 589,08 juta atau 16,30 % dari target penarikan tahun 2009 sebesar USD 3,62 milyar sebagaimana dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Status Penarikan Pinjaman Proyek Triwulan I TA 2009

(dalam juta USD)

No	Pemberi Pinjaman	Jumlah Proyek	Jumlah Pinjaman	Penarikan Kumulatif	Pinjaman Proyek belum ditarik	TA 2009		
						Target	Realisasi	%
1	Bank Dunia	21	2.393,80	1.270,42	1.123,38	673,31	145,10	21,55
2	ADB	25	1.500,50	415,12	1.085,38	239,96	48,37	20,16
3	JICA	45	6.926,20	2.324,44	4.601,76	1.395,36	142,90	10,24
4	Multilateral Lain	17	403,42	114,69	288,73	115,52	3,43	2,97
5	Bilateral	17	1.255,84	574,41	681,43	304,99	4,73	1,55
6	FKE	30	2.759,76	1.553,07	1.206,69	885,88	244,55	27,60
	Total	155	15.239,52	6.252,15	8.987,37	3.615,02	589,08	16,30

Catatan:

- Jumlah proyek FKE merupakan alokasi kredit ekspor
- Jumlah pinjaman JICA, Multilateral, Bilateral merupakan ekuivalen dalam USD

Secara umum persentase realisasi pinjaman proyek pada tahun anggaran berjalan periode Januari – Maret 2009 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama pada tahun 2008 yang hanya mencapai 8,69%. Secara umum penarikan pada tahun anggaran berjalan proyek-proyek yang bersumber dari Multilateral dan Bilateral relatif lebih rendah yaitu 2,97% dan 1,55%. Sebanyak 12 proyek dari 17 proyek bersumber dari Multilateral (Islamic Development Bank) belum melakukan penarikan karena proyek-proyek tersebut harus melakukan tender ulang dan memproses usulan eskalasi dan pekerjaan tambah. Dari Bilateral (Australia, Belanda, Belgia, China, Jerman, Korea dan Spanyol) sebanyak 11 dari 17 proyek juga belum melakukan penarikan. Secara umum proyek-proyek tersebut saat ini masih dalam proses pengadaan dan ditargetkan akan melakukan penarikan pada triwulan berikutnya.

II. Kinerja Pelaksanaan

2.1 Kinerja Pelaksanaan per Departemen/Lembaga

Sampai dengan dengan Triwulan I Tahun 2009, terdapat 21 departemen/ lembaga yang menjadi instansi penanggung jawab (*executing agency*) atas 156 pinjaman proyek

dan program. Sebagian besar pinjaman proyek yang sedang berjalan terkonsentrasi di 6 departemen/lembaga yaitu di Departemen Pekerjaan Umum (35), Departemen Pertahanan (21), PT. PLN (21), Departemen Perhubungan (12), Departemen Pendidikan Nasional (12) dan sisanya tersebar di 16 departemen/lembaga.

Kinerja pelaksanaan proyek-proyek pinjaman luar negeri sebagaimana pada tabel 4 di bawah ini diukur dengan melihat capaian atau realisasi penarikan pinjaman terhadap target tahun anggaran berjalan. Realisasi penarikan pinjaman yang mencapai di atas 20% menunjukkan realisasi penarikan yang relatif tinggi.

Tabel 4 memperlihatkan bahwa hampir seluruh realisasi penarikan pinjaman di departemen/lembaga penanggungjawab di Triwulan I tahun 2009 masih di bawah target yang ditetapkan. Realisasi pinjaman tertinggi dicapai oleh Bakosurtanal yang mencapai 92,68% dari target penarikan pinjaman, kemudian diikuti oleh Kantor Meneg PDT (83,33%), dan Badan Pertahanan Nasional (41,83%). Sedangkan untuk kementerian/lembaga lainnya realisasi masih di kurang dari 20% dari target.

Tabel 4. Kinerja Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Menurut Instansi Penanggungjawab posisi 31 Maret 2009

(dalam juta USD)

No	Instansi Penanggungjawab	Jumlah Proyek/ Program	Jumlah Pinjaman	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	Penarikan TA 2009		
				Jumlah	%		Target	Realisasi	%
1	Departemen Pekerjaan Umum	35	4.783,83	1.796,40	37,55	2.987,43	808,27	127,11	15,73
2	Departemen Pertanian	6	220,91	97,81	44,27	123,10	57,91	9,98	17,24
3	Departemen Pendidikan Nasional	12	864,00	271,90	31,47	592,11	191,11	32,45	16,98
4	Departemen Dalam Negeri	4	346,00	189,47	54,76	156,53	101,47	1,35	1,33
5	Departemen Perhubungan	12	1.244,72	425,43	34,18	819,29	133,65	20,45	15,30
6	Departemen Kesehatan	8	339,10	110,95	32,72	228,15	50,10	1,55	3,09
7	Departemen Agama	8	214,40	65,53	30,57	148,88	66,18	0,90	1,36
8	Departemen Keuangan								
	- pinjaman proyek	2	93,52	22,29	23,83	71,22	52,42	1,36	2,59
	- pinjaman program	1	600,00	172,30	28,72	427,70	300,00	125,50	41,83
9	Departemen Kelautan dan Perikanan	7	280,15	99,72	35,60	180,43	56,07	7,54	13,45
10	Bappenas	3	155,10	35,37	22,81	119,73	28,00	1,99	7,11
11	Badan Pertanahan Nasional	1	65,60	36,80	56,10	28,80	7,77	4,90	63,06
12	Departemen Pertahanan	21	2.125,87	1.295,21	60,93	830,66	660,10	230,00	34,84
13	Departemen Kominfo	3	66,42	10,86	16,35	55,56	21,47	2,04	9,50
14	Kepolisian RI	3	313,71	118,78	37,86	194,93	108,49	15,25	14,06
15	BRR	3	169,80	0,30	0,18	169,50	12,73	0,00	0,00
16	Kantor Meneg PDT	1	104,00	71,80	69,04	32,20	30,00	25,00	83,33
17	Bakosurtanal	1	64,93	1,26	1,94	63,67	0,13	0,12	92,68
18	Otorita Pengembangan Pulau Batam	1	12,07	6,50	53,87	5,57	5,57	0,00	0,00
	Pinjaman yang di-SLA-kan	23	3.775,39	1.595,77	42,27	2.179,63	1.223,58	107,09	8,75
19	PT. PLN	21	3.095,22	1.106,44	35,75	1.988,79	1.119,23	80,18	7,16
20	PT. PGN	2	580,17	489,33	84,34	90,84	94,36	26,91	28,52
21	Lembaga Pembiayaan Infrastruktur Ind	1	100,00	0,00	0,00	100,00	10,00	0,00	0,00
	Jumlah Pinjaman Proyek	154	15.239,52	6.252,15	41,03	8.987,37	3.615,02	589,08	16,30
	Jumlah Pinjaman Program	1	600,00	172,30	28,72	427,70	300,00	125,50	41,83
	Total	155	15.839,52	6.424,45	40,56	9.415,07	3.915,02	714,58	18,25

Sumber: LKPPPLN Edisi Triwulan I 2009

2.2 Progres Varian

Kinerja pelaksanaan proyek pinjaman luar negeri, selain diukur berdasarkan realisasi pinjaman terhadap target pinjaman pada tahun anggaran berjalan, dapat juga diukur berdasarkan angka progres varian. Angka progres varian positif menunjukkan penarikan dana lebih cepat dari target waktu yang dijadwalkan, sedangkan angka negatif menunjukkan hal sebaliknya. Angka progres varian didapat berdasarkan selisih antara persentase penarikan kumulatif dengan persentase waktu pinjaman yang sudah terpakai. Suatu proyek dikatakan mengalami keterlambatan penarikan pinjaman cukup signifikan apabila nilai progres variannya kurang dari -30 (< -30).

Tabel 4 memperlihatkan ada 58 pinjaman proyek yang mengalami keterlambatan yang cukup signifikan. Sebagian besar keterlambatan itu berasal dari pinjaman JICA sebanyak 18 proyek, ADB sebanyak 14 proyek dan Multilateral Lain (IDB dan IFAD) sebanyak 8 proyek. Sedangkan dari sisi departemen/lembaga, Departemen Pekerjaan Umum dan PT PLN merupakan departemen yang paling banyak memiliki proyek dengan angka progres varian < -30 (11 proyek), diikuti oleh Departemen Perhubungan dengan 7 proyek, serta Departemen Kesehatan dengan 6 proyek.

Tabel 5. Proyek-Proyek Pinjaman dengan Progres Varian Lebih Kecil -30

No	Instansi Penanggung Jawab>Nama Proyek	Kreditur	Progres Varian
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM			
1	4711-IND Water Resource & Irrigation Sector Management	Bank Dunia	-33,36
2	4744-IND Second Eastern Indonesia Region Transport	Bank Dunia	-42,02
3	2064-INO (SF) Participatory Irrigation Sector	ADB	-48,45
4	2065-INO Participatory Irrigation Sector	ADB	-47,73
5	2184-INO Road Rehabilitation II	ADB	-32,63
6	IP-528 North Java Corridor Flyover Project	JICA	-60,08
7	IP-529 Tanjung Priok Acces Road Construction Project	JICA	-45,49
8	IP-531 Tanjung Priok Acces Road Construction	JICA	-38,68
9	IP-534 Integrated Water Resources & Flood Management	JICA	-34,80
10	IP-543 Regional Infrastructure for Social & Economic Dev	JICA	-47,77
11	AIPRD-L-002 Eastern Indonesia National Road Improvement	Australia	-30,12
DEPARTEMEN PERTANIAN			
1	IND-0080 Improvement of Land and Irrigation Sys at Farm	IDB	-47,58
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL			
1	IND-0109/0110 The Integrated Diponegoro University Development	IDB	-83,53
2	IND-0114/0115 The North Sumatera University Hospital	IDB	-58,61

No	Instansi Penanggung Jawab>Nama Proyek	Kreditur	Progres Varian
DEPARTEMEN DALAM NEGERI			
1	4790-IND Initiatives for Local Government (ILGR)	Bank Dunia	-38,91
2	1964-INO (SF) Sustainable Cap Building for Decentralization	ADB	-46,99
3	2193-INO (SF) LGFGR Project	ADB	-88,77
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN			
1	IP-489 Railway DT of Cikampek-Cirebon (II)	JICA	-30,95
2	IP-507 Maritime Education and Training Improvement	JICA	-79,45
3	IP-508 Railway Electrification and DD Tracking	JICA	-63,06
4	IP-520 Maritime Telecommunication Syst. Development IV	JICA	-35,60
5	IP-521 The Urgent Rehab.Project of Tj. Priok	JICA	-56,43
6	IP-540 Railway DT on Java South Line III	JICA	-66,88
7	2002 66 973 Jabotabek Commuter Railways	Jerman	-37,13
DEPARTEMEN KESEHATAN			
1	2074-INO Decentralized Health Services II	ADB	-50,64
2	2075-INO (SF) Decentralized Health Services II	ADB	-47,59
3	2163-INO Comm. Water Services & Health Project	ADB	-38,68
4	2164-INO (SF) Comm. Water Services & Health Project	ADB	-39,12
5	2004 66 383 Improv. Od Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar	Jerman	-45,58
6	INA-10 Strengthening of Teaching Hospital	Korea	-47,11
DEPARTEMEN AGAMA			
1	IND-0064 Magnet School in Aceh Timur	IDB	-87,56
2	IND-0117/0118 The Development of Univ. of Alauddin Makasar	IDB	-53,46
DEPARTEMEN KEUANGAN			
1	4762-IND Government Financial Management Rev.Ad	Bank Dunia	-85,04
2	IND-0095 Strengthening of Customs Capacity Project	IDB	-42,92
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	4740-IND COREMAP II	Bank Dunia	-37,71
2	1962-INO (SF) Coral Reef Rehabilitation & Management II	ADB	-30,67
3	IP-519 Rehabilitation & Improvement Project of JFP	JICA	-44,46
4	SP-013 Fisheries Training Development in Indonesia	Spanyol	-40,27
BAPPENAS			
1	2127-INO (SF) State Audit Reform Sector Development Project	ADB	-40,47
2	2264-INO (SF) Infrastructure Reform Sector Dev. Project	ADB	-40,10
DEPARTEMEN KOMINFO			
1	IP-542 ICT Utilization Project for Educational Quality En	JICA	-40,12
2	EDCF INA-13 National ICT Human Resources	Korea	-30,16
3	EDCF LA INA-1 Batam e-Government Project	Korea	-38,52

No	Instansi Penanggung Jawab>Nama Proyek	Kreditur	Progres Varian
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA			
1	KE-POLRI-7 Alokasi KE TA 2005 / POLRI	FKE	-42,51
BRR			
1	IND-0112/0113 The Reconstruction of IAIN ar Raniry	IDB	-90,10
2	IND-0120 The Rehabilitation and Reconstruction of Simeulue	IDB	-54,14
BAKOSURTANAL			
1	IP-544 National Geo-Spatial Data Infrastructure Development	JICA	-48,23
PT. PLN			
1	1982-INO Renewable Energy Development	ADB	-35,03
2	1983-INO Power Transmission Improvement	ADB	-53,07
3	IP-516 Semarang PP Rehab & Gasfication	JICA	-51,56
4	IP-525 Ulubelu Geothermal Power Plant Construction III	JICA	-44,77
5	IP-532 Asahan Hydroelectric Power Plant Construction III	JICA	-37,58
6	IP-537 PLN Operation Improvement System for Supporting	JICA	-33,44
7	BEF-003 Scattered Diesel Power Project for 7 locations	Belgia	-45,07
8	PLN-004 KE III Lot 6, GIS 150 kV Jatiwaringin, PI, Pegang	FKE	-40,41
9	PLN-007 KE III Lot 5, UGC Duren Tiga-Taman Rasuna	FKE	-38,27
10	PLN-008 KE III Lot 10, 500 kV & 150 kV S/S & T/L Jatim-Jateng	FKE	-78,67
11	PLN-009 KE III Lot 14, 500 kV Transmission Lines Grati S/S	FKE	-30,73

Sumber: LKPPPLN Edisi Triwulan I 2009

III. Permasalahan Pelaksanaan

Keterlambatan dalam pelaksanaan pada proyek-proyek pinjaman luar negeri umumnya menyangkut masalah-masalah sebagai berikut:

- (1) **Pengadaan barang/jasa**, lamanya proses tender atau terjadinya *retender* sehingga seluruh atau sebagian paket belum dapat terkontrak seperti pada proyek *Farmer Empowerment Through Agriculture Technology* (4260-IND), *GFMRAP* (4762-IND), *Domestic Gas Market Development Project* (4810-IND), *Sustainable Aquaculture Development for Food* (2285-INO), *Coral Reef Rehabilitation & Management II* (1962-INO), *Power Transmission Improvement* (1983-INO), *Decentralized Irrigation System Improvement Project* (IP-509), *Urgent Disaster Reduction for Mt. Merapi, Progo River Basin, & Mt. Bawakaraeng* (IP-524), *North Java Corridor Flyover Project* (IP-528), *The Urgent Rehabilitation Project of Tanjung Priok Port* (IP-521), *Surabaya Airport Construction II* (IP-514), *Railway DT on Java South Line III* (IP-540), *National Geo-Spatial Data Infrastructure Development* (IP-544), *Aceh Reconstruction Project* (IP-545), *Semarang PP Rehabilitation and Gasfication* (IP-516), *Magnet School in Aceh Timur* (IND-0064), dan *The Reconstruction of IAIN Ar Raniry* (IND-0112/0113).

- (2) Terkait dengan **No Objection Letter** dari *lender*, proses sampai dengan penerbitan NOL relatif lama seperti pada proyek *Urban Sector Ref. Development Program* (4786-IND), *Support for The Poor and Disadvantage* (4788-IND), *LGFR Project* (2193-INO), *Nutrition Improvement through Community Empowerment* (2348-INO), dan *Power Transmission Improvement* (1983-INO).
- (3) Terkait dengan **proses penerbitan dokumen anggaran (DIPA)** serta **kekurangan alokasi dana DIPA** sehingga kegiatan tertunda seperti pada proyek *Water Resource & Irrigation Sector Management* (4711-IND), *Third WSSLIC-PAMSIMAS* (4204-IND), *BERMUTU* (4349-IND), *ILGR* (4790-IND), *COREMAP II* (4740-IND), *Second Eastern Indonesia Region Transport* (4744-IND), *Land Management Policy* (4731-IND), *Participatory Irrigation Sector* (2064-INO), *Neighborhood Upgrading Shelter Sector Project* (2072-INO), *Decentralized Health Service II* (2074-INO), *Nutrition Improvement through Community Empowerment* (2348-INO), *Madrasah Education Project* (2294-INO), *Infrastructure Reform Sector Development Project* (2264-INO), *Coral Reef Rehabilitation & Management II* (1962-INO), *PTSL for Water Resources Development II* (IP-505), *Water Resources Existing Facilities Rehabilitation* (IP-510), *Hasanuddin University Development* (IP-541), *Railway DT of Cikampek- Cirebon (II)* (IP-489), *Development & Upgrading of University Haluoleo* (IND-0105/0106), *Upgrading & Development of The State Islamic University of Sunan Gunung Djati Bandung Project* (IND-0126/0127), *Development of Belawan & Sibolga Fishing Port* (IND-0121), *The Rehabilitation and Reconstruction of Simeulue Island* (IND-0120), *Buoy Tender Vessel & Aid Tender Vessel* (NLG-06), *Improvement of Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar* (2004 66 383), dan *National ICT Human Resource* (EDCF INA-13),
- (4) Lemahnya **manajemen dan koordinasi**, masih terjadi pada proyek-proyek yang dalam pelaksanaannya memerlukan koordinasi dengan instansi lain maupun dengan Pemerintah Daerah seperti pada proyek *Second Eastern Indonesia Region Transport* (4744-IND), *Early Childhood Education & Development* (4205-IND), *Batanghari Irrigation Project II* (IP-504), *Rehabilitation & Improvement Project of JFP* (IP-519), *Urgent Disaster Reduction for Mt. Merapi, Progo River Basin, & Mt. Bawakaraeng* (IP-524), dan *Tanjung Priok Acces Road Project I* (IP-529).
- (5) Masalah **pembebasan lahan** yang membutuhkan waktu lama sehingga pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal semula. Secara umum masalah pengadaan/pembebasan lahan terjadi pada proyek-proyek pembangunan jalan dan proyek penanggulangan banjir perkotaan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum seperti pada proyek *Integrated Water Resources & Flood Management for Semarang* (IP-534), *Tanjung Priok Acces Road Project I* (IP-529), *Tanjung Priok Access Road Construction* (IP-531), dan *Eastern Indonesia National Road Improvement* (AIPRD-L-02). Masalah ini juga terjadi pada proyek perkeretaapian Departemen Perhubungan seperti *Railway Electrification and DD Tracking Project I* (IP-508) dan proyek-proyek di lingkungan PT. PLN seperti pada proyek *Muara Tawar Gas Fired PP Extension Project* (IP-513).
- (6) Masalah **backlog** seperti terjadi pada proyek *WSSLIC II* (3382-IND), *Second Eastern Indonesia Region Transport* (4744-IND), *Urban Poverty III* (4779-IND),

ILGR (4790-IND), *WSSLIC II* (3382-IND), *GFMRAP* (4762-IND), *COREMAP II* (4740-IND), *Land Management Policy* (4731-IND), *Support for The Poor and Disadvantage* (4788-IND), *Poor Farmers's Income Improvement Project* (1909-INO), *Marine Coastal Resources Management Project* (1770-INO), *Participatory Irrigation Sector* (2064/2065-INO), *Neighborhood Upgrading Shelter Sector Project* (2072-INO), *Decentralized Health Service II* (2074/2075-INO), *Nutrition Improvement through Community Empowerment* (2348-INO), *Madrasah Education Project* (2294-INO), *Coral Reef Rehabilitation & Management II* (1962-INO), *NUSSP-PNM* (2072-INO), *Rural Infrastructure Support Project* (2221-INO), *Community Water Services and Health* (2163/2164-INO), dan *STAR Development Project* (2127-INO).

IV. Langkah Tindak Lanjut

Terhadap masalah-masalah tersebut di atas telah dilakukan langkah tindak lanjut penyelesaian masalah. Langkah-langkah tersebut antara lain melaksanakan rapat koordinasi lanjutan yang melibatkan pihak proyek, departemen terkait, pemerintah daerah terkait maupun *lender* dan menyampaikan surat dalam rangka mengingatkan percepatan pelaksanaan proyek. Disamping itu beberapa langkah tindak lanjut yang perlu segera dilakukan adalah:

1. Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terutama untuk proyek-proyek yang mengalami keterlambatan.
2. Mempercepat penerbitan *No Objection Letter*.
3. Mempercepat penerbitan dokumen DIPA serta menambah kekurangan alokasi dana DIPA agar proyek dapat berjalan sesuai dengan jadwal.
4. Meningkatkan koordinasi baik internal maupun lintas instansi terutama untuk proyek *Second Eastern Indonesia Region Transport* (4744-IND), *Batanghari Irrigation Project II* (IP-504), dan *Tanjung Priok Acces Road Project I* (IP-529).
5. Meningkatkan frekuensi pertemuan, serta mengamankan lahan yang telah dibebaskan pada proyek *Muara Tawar Gas Fired PP Extensi3n Project* (IP-513).
6. Menyelesaikan permasalahan *backlog* agar tidak membebani rekening pemerintah.

Diharapkan langkah-langkah tindak lanjut tersebut dapat segera mengarah pada percepatan pelaksanaan untuk mengejar keterlambatan pencapaian target penyelesaian masalah pelaksanaan proyek-proyek pinjaman luar negeri, serta dapat dijadikan suatu referensi apabila terjadi permasalahan yang sama pada proyek di masa mendatang.

V. Pengembalian Sebagian Pinjaman

Berdasarkan hasil rapat pemantauan Triwulan I TA 2009 dapat diidentifikasi adanya dana pinjaman yang akan dikembalikan diperkirakan sebesar USD 37,31 juta berasal dari proyek *Decentralized Health Services II* (2074/2075-INO) dan *Coral Reef Rehabilitation and Management II* (1962-INO) pinjaman ADB serta proyek *WSSLIC II* (3382-IND) dan *Land Management Policy* (4731-IND) pinjaman Bank Dunia. Langkah

ini diusulkan karena (1) diperkirakan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sampai dengan batas waktu tutupnya loan dan (2) adanya sisa pinjaman yang tidak akan dimanfaatkan karena seluruh lingkup pekerjaan telah dipenuhi. Jumlah pembatalan untuk proyek *DHS II*, *Land Management Policy*, dan *Coral Reef Rehabilitation and Management II* saat ini masih terus dikonfirmasi dan dihitung oleh Kementerian/Lembaga masing-masing, sementara pengembalian pinjaman dari proyek *WSSLIC II* usulannya telah diproses.

Tabel 5. Pengembalian Sebagian Pinjaman

(dalam juta USD)

No	Instansi Penanggungjawab>Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Penutupan	Cancellation
	Departemen Kesehatan			
1	2074/2075-INO Decentralized Health Services II	29/03/2005	31/12/2010	17,40
2	3382-IND WSSLIC II	01/10/2000	30/06/2009	3,89
	Departemen Kelautan dan Perikanan			
3	1962-INO Coral Reef Rehabilitation and Management II	07/11/2003	31/12/2009	1,20
	Badan Pertanahan Nasional			
4	4731-IND Land Management Policy	31/08/2004	31/12/2009	14,82
	Jumlah			37,31